

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- C, Anwar, 'Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 3.1 (2010), 115914
- Ediwaman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009).
- Gunanegara, *Rakyat Dan Negara : Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu, Dan Yuridprudensi)* (Jakarta: PT.Tatanusa, 2008)
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Herlinda, E. *Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan*, 2004
- KPSPI, *Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 306)*, Edisi 1 Januari 2015, MAPPI, Jakarta, 2015
- Kusumawardani, Q. D. 2019. *Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*. *Veritas et Justitia*, 5(1).
- Lestari, Putri, 'Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), 71–86
- Mahmud, Ade, Chepi Ali Firman Z, Husni Syawali, Rizki Amrulloh, and Weganisa Weganisa, 'Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Suara Hukum*, 3.2 (2021), 227–50
- Meilya Normawaty Simanjuntak. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012*. *Premise Law Jurnal*. Vol.10. No.7 Universitas Sumatera Utara, 2015.
<<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/12245>>
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Nasional, Badan Pertanahan, 'Pengadaan_Tanah', 2020, 73–84

- Notonagoro, Pancasila Falsafah Negara, Airlangga, Surabaya, 1961.
- Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Jakarta: Bhanua Ilmu Populer, n.d.).
- Rahayu Subekti. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia*. Vol. 5 No. 2
- Sahnan, Sahnan, M. Yazid Fathoni, and Musakir Salat, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3.3 (2015), 421–34
<<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/257>>
- Saifullah, 'Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal', *Ilmiah Peuradeun*, II.2 (2014), 287–300
<<https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/35>>
- Sinta, Terakreditasi Nasional, Muhammad Ilham Arisaputra, and Wildan Ainun Mardiah, 'Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif', *Amanna Gappa*, 27.2 (2019)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudharto P. Hadi, Dimensi Hukum Pembangunan , UNDIP, Semarang, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Sunarto, *Peran Aktif dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014
- Suteki, G. T. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Sujadi, Suparjo, 'Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4.2 (2018), 1–24
<<https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>>
- Sutiyoso, Bambang, 'Mencari Format Ideal', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17.2 (2010), 217 <<http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/>>
- Syamsudin, By M, 'Keadilan Substantif Yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42 / PDT / 2011 / PT . Y', 2016
<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/19.-Keadilan-Substantif-yang-Terabaikan-Dalam-Sengketa-Sita-Jaminan.pdf>
- Tatik Janur Habibi, "Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi Dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Abimanyu"

(Universitas Diponegoro, 2007)

Tusk Advisory, 'The Impact of Indonesia's Infrastructure Delivery', 2018, 1–119

Umar Sholehudin, 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Urip Santoso, 2011, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanian", *Jurnal Hukum, ADIL : Jurnal Hukum* Vol.3 No.

Yaman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

Victor Emanuel. (2017). *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat dalam Kaitan dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang*. *Jurnal Penerangan Hukum*, Vol. 5 No. 2